

**PERAN PEREMPUAN
TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA
(STUDI KASUS KERJA SAMA BPBD JOMBANG DENGAN USAID-APIK)**

Bagus Kurniawan¹, Winda Nurlaily Rafikalia², Kasanusi³, Nensy Triristina⁴
kurniawan200389@gmail.com¹, windarafikalia12@gmail.com², kasanusi65@gmail.com³,
nensytriristina@gmail.com⁴
Universitas Darul Ulum Jombang

ABSTRAK

Sebagai akibat kontruksi gender yang telah berkembang dalam masyarakat, selama ini penanggulangan bencana minim melibatkan peran perempuan. Perempuan termasuk ke dalam kelompok rentan yang perlu diselamatkan ketika terjadi bencana, namun perempuan juga berpotensi besar untuk mengambil peran dalam penanggulangan bencana. Terdapat beberapa hambatan perempuan dalam bencana seperti gangguan fisik, faktor sosial dan budaya serta minimnya pelatihan tanggap bencana bagi wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas peran perempuan terhadap penanggulangan bencana di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sebagai bentuk program pelatihan desa tangguh bencana hasil kerja sama internasional antara BPBD Jombang dengan USAID-Apik dari Amerika Serikat. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan melakukan kajian terhadap laporan BPBD Jombang dan literatur lainnya terkait kerja sama internasional, isu bencana dan jenis kelamin. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap objek partisipatif perempuan di desa Sumobito yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana oleh USAID-APIK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional yang dilakukan BPBD Jombang dan USAID-APIK berhasil memasukkan nilai sensitive gender dalam isu bencana, ditunjukkan dengan keterlibatan perempuan dalam pelatihan penanggulangan bencana di Sumobito. Kelompok perempuan di Sumobito terbukti berhasil menunjukkan kemampuan assesment data, membuka posko dapur umum dan mendistribusikan makanan ketika wilayah mereka dilanda banjir besar pada tahun 2022.

Kata Kunci: Penanggulangan bencana, Perempuan, Sensitive gender, Kerja sama internasional.

ABSTRACT

As a result of gender construction that has developed in society, so far disaster management has minimally involved the role of women. Women are a vulnerable group who need to be saved when a disaster occurs, but women also have great potential to play a role in disaster management. There are several obstacles for women in disasters such as physical disorders, social and cultural factors and the lack of disaster response training for women. This research aims to determine the capacity of women's role in disaster management in Sumobito District, Jombang Regency, as a form of disaster resilience village training program resulting from international collaboration between BPBD Jombang and USAID-Apik from the United States. This research method uses literature studies by reviewing BPBD Jombang reports and other literature related to international cooperation, disaster issues and gender. The primary data collection technique was carried out by interviewing participatory women in Sumobito village who took part in disaster management training by USAID-APIK. The results of this research show that the international collaboration carried out by BPBD Jombang and USAID-APIK has succeeded in including gender sensitive values in disaster issues, as demonstrated by the involvement of women in disaster management training in Sumobito. The women's group in Sumobito proved successful in demonstrating data assessment skills, opening public kitchen posts and distributing food when their area was hit by major floods in 2022.

Keywords: Disaster management, Woman, Sensitive gender, International cooperation.

PENDAHULUAN

Sumobito adalah salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Jombang, posisinya berada di antara Kecamatan Kesamben, Mojoagung, Jogoroto, dan berbatasan dengan kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, terbentang pada 07° 24'01" - 07° 45'01" Ls dan 112° 20'01" - 112° 30'01" Bt.

Wilayah Kecamatan Sumobito memiliki 21 desa, terbagi dari 77 dusun, 149 rukun warga (RW), dan sebanyak 445 rukun tetangga (RT), dengan luasan wilayah sebesar 47,64 km persegi, iklim Kecamatan Sumobito memiliki 2 jenis yaitu musim kemarau dan musim penghujan karena terletak di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain di Kabupaten Jombang.

Kecamatan Sumobito memiliki penduduk sebanyak 91.568 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 46.491, sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan sebanyak 45.077 jiwa (BPS Kabupaten Jombang 2022).

Kecamatan Sumobito merupakan daerah rawan bencana tingkat sedang, hal ini disebabkan karena kecamatan Sumobito dikelilingi sungai besar dan kecamatan sumobito merupakan pertemuan tiga sungai yang memiliki hulu di kabupaten Malang dan di Wonosalam kabupaten Jombang.

Kecamatan Sumobito menjadi langganan banjir hampir disetiap tahunnya yang dimana sumobito sendiri merupakan dataran rendah yang hanya memiliki ketinggian 90 mdpl dan merupakan daerah pertemuan tiga sungai yang mengalir di kabupaten jombang (Kusnuardi 2011)

Bencana, Bencana merupakan keniscayaan yang dapat terjadi dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan dan dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Bencana merupakan sebuah misteri dalam kehidupan dan penghidupan manusia, tindakan yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan upaya-upaya guna mengurangi risiko korban bencana. Menurut (UU no 24 2007) adalah sesuatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan serta kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam dan faktor manusia. Bencana terbagi menjadi tiga yaitu bencana alam, non-alam dan sosial.

Pertama, bencana alam menurut BNPB adalah adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; Kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit sedangkan; Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror (UU no 24 2007).

Bencana di Indonesia dan negara lain telah mendorong masyarakat dunia untuk menunjukkan dukungan, dan bantuan. Tidak ada negara yang dapat menolak bantuan asing tanpa pembenaran yang sah sebagai bagian dari kemitraan dan kerja sama regional dan internasional, terutama dalam kasus tragedi dengan jumlah korban yang cukup besar dan kemampuan dalam negeri yang tidak memadai. Keikutsertaan dan dukungan lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah dapat memperkuat upaya para pemangku kepentingan (stakeholders) di Indonesia dalam penanggulangan bencana. Upaya tersebut dapat berupa penguatan tanggap bencana, penurunan risiko dan ancaman bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan percepatan pemulihan, dalam penanganan bencana di Indonesia.

Kerja sama terkait tanggap bencana oleh pemerintah Indonesia Sudah dibangun bersama banyak negara, salah satunya Amerika Serikat. Kedua negara tersebut sepakat untuk terus membangun kerja sama di bidang penanggulangan bencana. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian serius terhadap penanggulangan bencana di Indonesia. Kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah Amerika dan Indonesia antara lain pengaktifan Indonesia All-hazards Warning and Risk Evaluation (InAWARE), Incident Command System (ICS) dan penguatan pusat pendidikan dan pelatihan serta adaptasi beberapa sistem penanggulangan bencana (U.S. Embassy Jakarta n.d.). Salah satu kerja sama penanggulangan bencana antar negara adalah antara USAID-APIK dari pemerintah Amerika Serikat dan BPBD Jombang pada tahun 2019.

Pada beberapa kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang telah dilakukan, selama ini hanya memfokuskan pada upaya yang melibatkan peran laki-laki saja padahal perempuan masuk ke dalam kelompok rentan yang perlu dilindungi dan diberdayakan karena juga memiliki peran penting dalam mitigasi bencana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kerja sama antara USAID dan BPBD Jombang mampu mengakomodir pelatihan yang sadar akan kesetaraan gender. Program desa tangguh bencana di Sumobito – Jombang turut melibatkan peran perempuan dalam upaya-upaya tanggap bencana.

Mengenai penelitian terkait penanggulangan bencana di Jombang, selama ini hanya fokus menganalisis terkait kerja sama pemerintah Jombang dan pemerintah Amerika Serikat saja (Stephanus .M.E 2021). Adapula yang membahas terkait pentingnya kesiapsiagaan manajemen bencana dengan melibatkan perempuan, namun hanya di tingkat regional Asia Tenggara secara umum saja (Mehta 2007). Berdasarkan data tersebut, dapat ditunjukkan bahwa belum terdapat penelitian atau hal semacamnya mengenai pendekatan sensitive gender pada penanggulangan bencana di Jombang. Pembahasan dalam artikel berikut ini akan mendiskusikan bagaimana peran perempuan terhadap penanggulangan bencana pada studi kasus kerja sama BPBD Jombang dengan USAID-APIK di Kecamatan Sumobito kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memberikan gambaran mengenai kondisi di lapangan secara faktual dan sistematis mengenai faktor yang ada. Data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan literatur-literatur (laporan dari BPBD, laporan dari desa yang menjadi obyek penelitian dan website) yang dipilih dan dianalisis secara filosofis dan teoritis sebelum disajikan ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan data primer dapat dikumpulkan melalui teknik bola salju (snowball sampling) untuk dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci sebagai objek yang utama dan partisipatif yaitu para perempuan di desa Sumobito yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana oleh USAID-APIK.

Demi mendapatkan data yang pasti, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan yaitu observasi dan wawancara sebagai data pendukung. Didalam penelitian ini Penulis mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif, dan penarikan kesimpulan sesuai fokus permasalahan berdasarkan data dan bukti yang telah diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jombang merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan

secara resmi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965. Secara geografis Jombang berada pada 112o 03'45'' – 112o 27'21'' Bujur Timur dan 07o 20'21'' – 07o 46'45'' Lintang Selatan dengan luas wilayahnya 1.159,50 km², Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, 306 Desa/Kelurahan dan 1.258 Dusun. Ibu Kota Kabupaten Jombang mempunyai ketinggian 44 meter di atas permukaan laut. Di sebelah timur kabupaten Jombang berbatasan dengan kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nganjuk dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan sebagian besar wilayah Jombang terdiri dari dataran rendah yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter (Badan Pusat Statistik n.d.)

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi bencana yang beragam dan cukup komplis. Mulai dari potensi banjir yang dapat melanda hampir seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Jombang, dan ada beberapa kecamatan yang rawan longsor diantaranya adalah, Plandaan, Kabuh, Bareng dan Wonosalam. Jombang juga terlewati dua Sungai besar yaitu Sungai Brantas dan Konto yang dimana dua Sungai tersebut memiliki tanggul yang bangunannya belum permanen dan hal itu menjadi potensi untuk menyebabkan longsor tanggul salah satu tanggul Sungai Brantas yang berada di Kecamatan Megaluh juga rawan longsor diakibatkan abrasi air Sungai yang semakin tahun semakin melebar dikarenakan tidak adanya tembok penahan tanggul yang permanen.

Selain longsor, angin puting beliung juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah kabupaten Jombang, terdapat kawasan rawan bencana berupa gempa tektonik terjadi akibat adanya patahan Ploso yang walaupun sudah lama tidak aktif hal itu membuat Jombang kompleks terkait bencana yang mengancamnya, dari 21 kecamatan di kabupaten Jombang mulai dari kecamatan Kabuh sampai Wonosalam memiliki potensinya masing-masing (Radar Jombang 2024).

Dari sekian banyak kecamatan yang berada di kabupaten Jombang, Sumobito memiliki jumlah desa paling banyak kejadian bencana dari pada kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di kabupaten Jombang. Selain itu, kejadian bencana di Sumobito paling kompleks dikarenakan letak geografis kecamatan Sumobito menjadi titik temu antara tiga DAS sungai di kabupaten Jombang yaitu Sungai Pancir, Sungai Catak Banteng, dan Sungai Gunting yang hampir setiap tahun terjadi bencana khususnya banjir (BPS Kabupaten Jombang 2022).

Dalam (UU no 24 2007) disebutkan bahwa Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Berikutnya didalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Menindaklanjuti ketentuan pasal 5 Undang-undang Penanggulangan Bencana maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah.

Pada tahun 2011 pemerintah kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang (peraturan daerah 2011) tentang organisasi tata kerja BPBD Kabupaten Jombang. Adapun misi yang harus dijalankan agar segala proses

penanggulangan bencana dapat sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan maka misi yang dirumuskan tersebut tetap mengacu pada tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Jombang. Misi - misi tersebut di antaranya adalah: meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal; melindungi masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana, melindungi masyarakat Kabupaten Jombang pada saat tanggap darurat; koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi (peraturan daerah 2011).

Dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang di tahun 2018 masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang merupakan RPJMD periode keempat. Visi dalam RPJMD merupakan visi bupati/wakil bupati terpilih yaitu “Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”, sejalan dengan harapan visi penyusunan RPJMD 2018-2023 juga memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan daerah (Pemerintah Kabupaten Jombang 2018).

Selain dalam RPJMD kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang dalam penanggulangan bencana juga tertuang dalam rencana strategis (renstra) BPBD kabupaten Jombang yang memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam hal penanggulangan bencana dan yaitu pengurangan risiko bencana pada daerah yang rawan akan terjadinya bencana. Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana baik dimasa pra, saat dan pasca serta tercukupinya kebutuhan unsur penanganan bencana dan penetapan strategi. Adapun cara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan melalui program-program yang melibatkan masyarakat dunia melalui program yang ingin dicapai yaitu meningkatkan jumlah desa tangguh bencana, meningkatkan sosialisasi tentang kebencanaan, meningkatkan pemantauan dan penyebaran informasi bencana secara menyeluruh, meningkatkan pengurangan resiko bencana, meningkatkan pelayanan penanganan bencana, meningkatkan penanganan darurat bencana dan kebakaran, dan meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana dan kebakaran (portal resmi pemerintah kabupaten jombang 2021).

Kerja sama Internasional dalam Penanggulangan Bencana

Di era makin beragamnya isu dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, kerja sama internasional menjadi alternatif menarik yang dapat dilakukan. Transfer pengetahuan dan teknologi menjadi solusi positif dalam kerja sama penanggulangan bencana. Secara umum kerja sama internasional diartikan sebagai hubungan kerja sama yang dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral), dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara (NGO dan kelompok masyarakat). Kerja sama internasional dapat saling menguntungkan negara satu sama lain dan terwujud sebagai akibat dari penyesuaian dalam merespon atau mengantisipasi suatu peristiwa (Pradipta and Afrimadona 2020). Dalam kasus ini maka peristiwa yang coba diantisipasi adalah dampak atau kerugian dari suatu bencana di Kabupaten Jombang.

BPBD Kabupaten Jombang dalam hal penanggulangan bencana membentuk sebuah kerja sama internasional dengan pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang pengurangan resiko bencana. Perlu diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Jombang memiliki keterbatasan sumber daya, baik kemampuan administrasi maupun keterampilan teknik. Adanya keterbatasan tersebut diperlukan kerja sama internasional dengan mengadopsi teknik pola pengurangan resiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat (kemenlu 2019).

Terdapat beberapa hal terkait kerja sama penanggulangan bencana yang disepakati antara pemerintah kabupaten Jombang dengan pihak pemerintah Amerika Serikat antara lain peningkatan kapasitas melalui pertukaran pakar dan praktisi penanggulangan bencana,

sistem pemantauan bencana, dan pelatihan. Selain itu terdapat upaya pengembangan rencana kesiapsiagaan bencana yang komprehensif, mempersiapkan koordinasi antar pemerintah yang lebih baik dalam menghadapi bencana, mendorong penggunaan asuransi, dan memberikan program bantuan federal untuk kerugian akibat bencana (Stafford 2000).

Selanjutnya FEMA (Federal Emergency Management Agency) melalui Badan Pembangunan Internasional pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini USAID menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang program kerja sama tersebut dilaksanakan oleh Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) yang merupakan lembaga dibawah naungan USAID. Program tersebut bekerja dengan cara membantu pemerintah daerah dalam mengelola dampak perubahan iklim dengan tujuan akhir untuk meningkatnya integrasi ke dalam kebijakan daerah, meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam informasi tentang perubahan iklim.

Salah satu bentuk kontribusi APIK dalam membantu pemerintah Kabupaten Jombang adalah penyusunan profil Desa Rawan Bencana, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan pelatihan bagi karyawan BPBD untuk menjadi trainer of trainer Destana. Dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat atau komunitas yang dilaksanakan melalui pengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana, hal ini diatur dalam peraturan kepala no 1 tahun 2012 tentang desa atau kelurahan tangguh bencana (BNPB 2012). Di dalam pembentukan desa tangguh bencana secara langsung mengakomodir pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat yang diperkuat dengan informasi ilmiah. Harapannya, melalui proses ini dapat terbentuk masyarakat yang tangguh akan kerentanan terhadap datangnya bencana dan perubahan iklim yang mana tiap tahun dampaknya akan semakin terasa, dan meningkatkan pengembangan pola pikir masyarakat tentang dampak bencana (BNPB 2012).

Dampak perubahan iklim berkontribusi terhadap seberapa besar dampak yang akan diterima langsung oleh masyarakat yang daerahnya rawan akan terjadinya bencana. Karakteristik dari kajian risiko bencana partisipatif adalah bertujuan untuk menakar risiko bencana, namun juga bertujuan sebagai proses pemberdayaan komunitas atau kelompok warga dengan membangun kesadaran kritis atas sumber daya dan risiko bencana yang dihadapi oleh suatu desa atau kecamatan, terjadinya pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar generasi dan pola pikir warga dalam menghadapi ancaman bencana, adapun lima kecamatan di kabupaten Jombang yang menjadi desa tangguh bencana bentukan hasil kerja sama pemerintah kabupaten Jombang dan Amerika Serikat yaitu kecamatan Sumobito, Mojoagung, Mojowarno, Barend dan Wonosalam yang mana kelima kecamatan tersebut menjadi daerah rawan bencana dengan risiko bencana paling tinggi di kabupaten jombang (BNPB 2012). Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada desa tangguh bencana yang berada di Kecamatan Sumobito.

Hambatan Peran Perempuan Saat Terjadi Bencana

Bencana alam dapat memberikan dampak yang signifikan dan berbeda bagi perempuan, hal ini disebabkan karena peran dan tanggung jawab perempuan yang berbeda dalam masyarakat. Kerentanan perempuan dianggap lebih tinggi terhadap beberapa jenis bencana dilihat dari kebutuhan, perspektif, dan pengalaman perempuan dalam semua tahapan siklus bencana mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi (Handayani 2019).

Kesetaraan gender dalam mitigasi bencana perlu ditingkatkan mengingat laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam menghadapi tuntutan masing-masing ketika terjadi bencana. Perempuan dan bencana memiliki hubungan yang kompleks dan bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, perempuan merupakan agen penting dalam

penanggulangan bencana, mereka memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman unik yang dapat membantu membangun komunitas yang lebih tangguh (Lara 2022). Namun di sisi lain perempuan sering kali dipandang sebagai korban. Perempuan menjadi korban yang tidak proporsional dari bencana, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakadilan gender yaitu perempuan memiliki akses yang rendah terhadap sumber daya dan informasi, serta perempuan memiliki kontrol yang lebih sedikit atas hidup mereka sendiri (Lara 2022).

Faktor tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap dampak bencana. Perempuan juga sering bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak dan orang tua lansia, hal ini dapat membuat mereka lebih sulit untuk melarikan diri dari bahaya atau mencari bantuan setelah bencana. Terdapat relasi hubungan yang tidak setara yang masih didominasi oleh laki-laki sehingga sering kali perempuan secara tidak disadari kurang dihargai dalam bencana (Nuriana, Rusyidi, and Fedryansyah 2020).

Dalam hal penanggulangan bencana, masih menjadi hal yang tabu bagi perempuan untuk mereka berperan dalam penanggulangan bencana akibat faktor sosial dan budaya yang dapat menyebabkan keterbatasan peran gender perempuan (Lubis et al. 2023). Mayoritas dan kebanyakan masyarakat di Indonesia menganut budaya ketimuran dimana hal tersebut menjadi pembatas perempuan dalam hal penanggulangan bencana, terbukti ditandai dengan banyaknya petugas atau pelaku penanggulangan bencana mayoritas dari kaum laki-laki. Fakta tersebut yang membatasi gerak perempuan untuk belajar tentang ilmu kebencanaan, padahal dapat sangat berguna bagi diri mereka sendiri dan keluarganya disaat bencana itu datang.

Selain aspek sosial dan budaya perempuan juga harus menerima kodratnya secara fisik yang setiap saat harus menjalani masa datang bulan (haid) dan saat hamil menjadi hambatan tersendiri untuk perempuan dalam hal penanggulangan bencana dimana dengan keadaan seperti itu perempuan harus membatasi gerak dan harus extra menjaga diri selain untuk kesehatan dirinya sendiri namun juga untuk kesehatan dan keselamatan bayi yang dikandungnya. Apabila seorang perempuan yang sedang mempunyai balita atau sedang menyusui kerentanan perempuan dan hambatannya adalah menjaga bayi dan juga menjaga dirinya sendiri disaat tubuhnya rentan dan masih lemah karena baru melahirkan atau fase sedang menyusui (Listyowati and Siscawati 2023).

Perempuan menghadapi berbagai hambatan yang membatasi peran mereka dalam tahap pra-bencana, akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Keterbatasan akses dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tanggung jawab domestik yang tidak proporsional (Listyowati and Siscawati 2023), kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yang menjadi salah satu faktor hambatan perempuan saat pra-bencana yang dimana tugas pokok dan fungsi ibu rumah tangga untuk menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan langsung dengan rumah tangga mereka mulai mengurus rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan perlengkapan anak bahkan tak bisa dipungkiri menyiapkan kebutuhan suami.

Selain hal tersebut keterbatasan kemampuan seorang perempuan juga dikarenakan perempuan tidak mendapat pelatihan yang cukup dan bisa dikatakan minim karena perempuan dianggap hanya sebagai tukang masak hal ini berbeda dengan laki laki yang mendapatkan pelatihan yang cukup meskipun tidak rutin (Handayani 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan ketika dihadapkan pada bencana masih menghadapi beberapa hambatan baik secara kodrati fisik, faktor sosial dan budaya serta minimnya pelatihan tanggap bencana bagi perempuan. Kondisi-kondisi tersebut merupakan permasalahan gender yang menimbulkan ketidakadilan sehingga perempuan dipandang

sebagai kelompok yang eksklusif dalam kebencanaan.

Perempuan Sebagai Agen Penting dalam Penanggulangan Bencana

Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (destana) di Sumobito secara tak langsung juga membantu tugas pemerintah dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang, mengingat minimnya jumlah petugas kabupaten dalam penanggulangan bencana. Untuk total keseluruhan 5 kelurahan dan 301 desa mustahil rasanya dapat menangani semua wilayah apabila terdapat kejadian dalam waktu yang sama di beberapa wilayah berbeda. Dengan jumlah desa yang harus dilayani lebih dari 10 sudah dipastikan petugas dari kabupaten akan kewalahan, apalagi jika dari petugas kabupaten tersebut tidak terdapat sosok perempuan.

Kekhawatiran tersebut coba diatasi oleh Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sumobito dengan memberdayakan perempuan untuk penanganan dini terhadap bencana (berita jatim 2021). Selain menguntungkan pihak atau komunitas desa, langkah tersebut juga menguntungkan pihak kabupaten sebagaimana yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2020 yang bertemakan 'Bencana Urusan Bersama'. BNPB mengingatkan semua stakeholders khususnya BPBD baik provinsi, kabupaten dan kota untuk terus mengajak unsur pentahelix dalam hal penanggulangan bencana yaitu pemerintah, akademisi (pelajar), dunia usaha, masyarakat dan media masa secara bersama-sama dalam hal penanggulangan bencana (BNPB 2020 2020).

Perempuan memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di semua tahap. Penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran tentang resiko bencana, kesiapsiagaan, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan terakomodasi dalam proses penanggulangan bencana (Sulistiyo 2015). Hal-hal yang penting untuk ditingkatkan terhadap perempuan dalam penanggulangan bencana juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sehingga dapat memperkuat organisasi perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses berkelanjutan dan melibatkan semua pemangku kepentingan kebijakan, termasuk pemerintah, organisasi kemanusiaan, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil. Perempuan di Sumobito mendapatkan beberapa pelatihan seperti pelatihan penilaian dini bencana dan pelatihan memasak dengan jumlah yang sangat besar (detikcom 2022).

Perempuan merupakan salah satu peran penting dalam upaya penanggulangan bencana karena berbagai alasan, peranan penting perempuan dalam tahap tanggap bencana dan pemulihan, terutama di tingkat rumah tangga. Peran perempuan dalam rumah tangga merupakan elemen mendasar dalam tata kelola risiko bencana. Pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan bencana dianggap penting karena perempuan memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk memahami dan mengelola risiko bencana, serta perempuan memiliki pengetahuan dan informasi tentang risiko bencana di daerah mereka. Perempuan dianggap lebih mampu mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari ancaman bencana yang mana insting perempuan itu lebih kuat dari pada laki-laki (Hemachandra, Amaratunga, and Haigh 2018).

Penting untuk di ketahui bahwa perempuan dianggap sebagai agen perubahan yang efektif terkait dengan mitigasi bencana. Perempuan sering memiliki pengetahuan dan keahlian kuat yang dapat digunakan dalam mitigasi bencana, strategi pengurangan bencana dan adaptasi. Perempuan juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan di

semua tingkatan penanggulangan bencana, dari tingkat komunitas hingga nasional di mana mereka diharapkan mampu memimpin dan mengelola respon bencana karena perempuan yang memiliki banyak keterampilan dan pengalaman dapat dimanfaatkan dalam respon bencana, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kepedulian terhadap orang lain.

Dalam hal kepedulian, perempuan memiliki sifat yang sudah menjadi bawaan yaitu perempuan memiliki hati yang lemah dan lembut (Lubis et al. 2023). Sehingga dengan sifat naluri yang dimiliki tersebut, perempuan dapat melakukan trauma healing guna pemulihan psikologis korban bencana. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh perempuan ialah Psychological First Aid yaitu pendekatan dengan cara mendengarkan namun tidak banyak bertanya, sehingga dapat memberikan ruang bagi para korban untuk menyampaikan apa yang dirasakan (Hedriyanti, Ab, and Makassar 2021).

Penanggulangan Bencana yang Sensitive Gender di Sumobito

Menjadi sangat penting bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana untuk mendapatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan sekaligus pelatihan dalam menghadapi bencana. Penanggulangan bencana juga penting untuk mempertimbangkan sensitive gender dalam pelaksanaannya. Dalam Pendekatannya berupaya meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan aspek reproduksi dan sosio-cultural gender. Menurut European Commission, melalui pendekatan sensitive gender maka dapat mendorong kesetaraan distributive of resources dalam konteks bencana (Nuriana et al. 2020). Menurut Ashraf jika terdapat ketidaksetaraan gender dalam penanggulangan bencana maka dapat berdampak terhadap terhambatnya efektivitas program bantuan dan layanan program kebencanaan.

Sumobito merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang dengan jumlah desa terbanyak. Wilayah Kecamatan Sumobito memiliki 21 Desa yang terbagi menjadi 77 Dusun, 149 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 445 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah sebesar 47,64 km persegi. Kecamatan Sumobito memiliki jumlah penduduk sebanyak 91.568 jiwa, dengan presentase jumlah penduduk laki-laki sebanyak 46.491, sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu sebanyak 45.077 jiwa. Untuk jumlah kelompok umur (0-18 tahun) berjumlah 27.832 jiwa, permasalahan yang sering timbul dalam suatu masyarakat baik secara langsung dan tak langsung meliputi kekerasan, anak terlantar, bencana dan bahaya narkoba (BPS Kabupaten Jombang 2022).

Sumobito mempunyai potensi bencana yang kompleks mulai dari angin kencang, banjir, kebakaran dan terakhir adalah pandemi Covid-19. Maka tak salah apabila program kerja sama antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan USAID di tempatkan di kecamatan Sumobito dengan luasan wilayah yang besar, jumlah desa terbanyak dan potensi bencana yang besar pula. Data terakhir yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Jombang menunjukkan kenaikan kejadian bencana yang sangat drastis dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2018 ada 15 kejadian di wilayah Sumobito dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kejadian hampir dua kali lipatnya yaitu berjumlah 29 kejadian (Sumber: BPBD Jombang).

Tanggal 9 September 2019 di desa Madiopuro kecamatan Sumobito terbentuklah sebuah forum yang berisikan seluruh perwakilan dari desa Madiopuro baik laki-laki, perempuan, pemuda dan pemudi dimana forum tersebut diberi nama Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Madiopuro Tanggap Bencana (Mantab). Forum tersebut dibentuk dan digagas oleh berbagai elemen baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa dan masyarakat yang mana tugas pokok dan fungsinya adalah penanganan dini bencana meliputi assesment data terdampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar di waktu bencana, pendidikan dan pengembangan ilmu terkait kebencanaan, pengurangan risiko yang mungkin terjadi di desa Madiopuro atau di wilayah Sumobito pada umumnya

(Suryana 2013).

Upaya penanggulangan bencana di Sumobito menjadi contoh bahwa terdapat peningkatan kesadaran sensitive gender dengan melibatkan perempuan dalam ragam kegiatan penanggulangan bencana. Hal ini merupakan upaya agar perempuan dapat memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga dapat aktif dan berperan dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan diri (Permen P.A 2021). Perempuan memiliki peran yang penting dalam tahap bencana, baik dalam pemulihan fisik maupun psikologis masyarakat. Peran perempuan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa perspektif, salah satunya yaitu perspektif gender yang memiliki makna yaitu melihat bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sama dalam upaya penanggulangan bencana.

Kesetaraan perempuan dan isu gender menjadi isu yang memperoleh tempat khusus dalam studi hubungan internasional, mengingat banyaknya isu perempuan yang kompleks dan ketidakadilan di beberapa tempat terhadap kelompok perempuan. Nilai sensitive gender ini juga yang coba dimasukkan melalui kerja sama internasional BPBD Jombang dan USAID-APIK dalam program pelatihan penanggulangan bencana. Apabila pelatihan-pelatihan sebelumnya yang dilakukan oleh BNPB hanya melibatkan relawan laki-laki saja (Suryana 2013). namun berbeda dengan pelatihan yang diberikan oleh USAID ini yang berusaha mengajak keterlibatan perempuan untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana.

Dalam penanggulangan bencana di Sumobito perempuan memiliki peranan yang bisa dibilang sentral karena mereka bertugas sebagai sub-bagian pemenuhan kebutuhan dasar seperti pencukupan pangan dan logistik untuk korban yang terdampak banjir. Pada tahun 2022 terjadi banjir yang melanda 16 desa di kabupaten Jombang yang salah satunya merendam di kecamatan Sumobito. Banjir yang menggenangi selama 24 jam bahkan lebih membuat warga yang terdampak tidak dapat beraktifitas, salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan dasar. Atas inisiatif pemerintah kabupaten Jombang dalam hal ini BPBD dan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) bekerja sama dengan FPRB desa Madiopuro membuka dapur umum untuk mencukupi kebutuhan dasar warga yang terdampak di dua kecamatan yaitu kecamatan Sumobito dan Kesamben. Hampir seluruh pelaku dalam kegiatan ini sepenuhnya perempuan yang sudah dibekali oleh ilmu pelatihan saat pembentukan desa tangguh bencana oleh USAID.

Para perempuan tersebut selain sebagai juru masak mereka juga ikut andil dalam pendistribusian kebutuhan dasar seperti makanan, minuman bahkan obat-obatan. Hal ini senada dengan yang dikatakan salah satu perempuan di desa Sumobito “Jangankan masak, untuk minum saja kami harus beli air galon dan makan kami harus disupport oleh ibu-ibu kader dan relawan desa yang membuka posko dapur umum di balai desa sana.” Sembari melakukan pendistribusian makanan, ibu-ibu juga menyertakan kader dari puskesmas untuk melakukan assesment atau dalam penyebutan lain diartikan sebagai pendataan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah, kebutuhan dan kekurangan. Hal ini juga dilakukan bersama anggota FPRB desa Madiopuro untuk melakukan pendataan di waktu bencana banjir terjadi. Pendataan tersebut digunakan untuk mengetahui warga yang terdampak akibat banjir dengan tujuan memastikan jumlah dan pengelompokan korban akibat bencana tersebut dan assesment data itu juga digunakan untuk pelaporan kepada kepala desa dan pemerintah daerah.

Selain assesment berbasis jumlah, assesment berbasis umur juga dilakukan oleh bidan desa setempat yang mana hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah warga atau pengungsi yang berumur dibawah 5 tahun dan di atas 60 tahun atau yang biasa disebut kelompok rentan untuk mendapatkan prioritas pelayanan baik kesehatan ataupun evakuasi.

Para perempuan di Sumobito (FPRB Madiopuro) juga semakin paham akan tahapan bencana itu seperti apa dan tindakan awal apa yang harus dilakukan saat bencana itu terjadi juga tidak menutup kemungkinan terjalin relasi antara sesama relawan lembaga lain yang bergerak di bidang yang sama yaitu penanggulangan bencana berbasis komunitas, hal ini senada dengan yang diucapkan salah satu perempuan di Sumobito yang mengenal satu sama lain unsur relawan. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, peranan perempuan ketika terjadi bencana banjir mereka tetap beraktifitas secara normal, membersihkan rumah dan membantu di tenda atau dapur umum. Telah menjadi naluri seorang perempuan yang lebih aware dan multitasking untuk mengurus urusan domestik atau keperluan dalam rumah tangganya sendiri serta kemampuan membantu percepatan daya pulih masyarakat pasca bencana.

KESIMPULAN

Perempuan memiliki kemungkinan besar menjadi korban bencana alam yang dimana perempuan termasuk kelompok rentan yang perlu diselamatkan begitu pula sebaliknya perempuan mempunyai potensi untuk mengambil peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang bekerja sama dengan USAID APIK berusaha memberdayakan perempuan dalam program desa tangguh bencana untuk menciptakan kondisi antar kelompok memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam ragam kegiatan penanggulangan bencana. Upaya dan strategi pengurangan resiko bencana yang lebih sensitive gender dengan tidak mengesampingkan responsif gender perempuan dan berbasis pada hak korban bencana.

Saran untuk pemerintah Kabupaten Jombang yang hal ini diwakili oleh BPBD Jombang agar ditingkatkan lagi program-program penanggulangan bencana berbasis sensitive gender, hal ini bertujuan agar saat terjadi bencana di suatu wilayah bisa minim kerugian baik materil atau nyawa dengan mengoptimalkan koordinasi antara peran laki-laki dan perempuan. Selain Kecamatan Sumobito agar terus ditingkatkan kemampuan kapasitas wilayah kecamatan lainnya agar kapasitas penanggulangan bencana semakin terpadu antara pemerintah daerah dan pemerintah di tingkat bawahnya. Mengingat semakin banyak dan seringnya bencana di Kecamatan Sumobito, maka kapasitas desa tangguh Madiopuro dalam penanggulangan bencana agar ditingkatkan lagi melalui pelatihan yang efektif dan regenerasi terus berjalan dan tidak berhenti sampai disini saja dalam hal perekrutan relawan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. n.d. "Jombang Dalam Angka 2019." 2019. berita.jatim. 2021. FPRB Jombang Terbaik Se Jatim. jombang.
- BNPB. 2012. "Perka BNPB Nomor 1 Desa Tangguh Bencana." Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 (1095):1–31.
- BNPB 2020. 2020. Rakurnas Penanggulangan Bencana 2020.
- BPS Kabupaten Jombang. 2022. "Kecamatan Sumobito Dalam Angka." 1–197.
- detikcom. 2022. Banjir Rendam 16 Desa Di Jombang Jatim, 3.444 Rumah Terdampak. jombang.
- Handayani, Baiq Lily. 2019. "Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana." *Journal of Urban Sociology* 1(1):16. doi: 10.30742/jus.v1i1.561.
- Hedriyanti, Gyfani, Syamsuddin Ab, and Alauddin Makassar. 2021. "Women'S Role on Disaster Management in South Sulawesi Province Social Services." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 4(2):2655–7320.
- Hemachandra, Kinkini, Dilanthi Amaratunga, and Richard Haigh. 2018. "Role of Women in Disaster Risk Governance." *Procedia Engineering* 212(2017):1187–94. doi: 10.1016/j.proeng.2018.01.153.
- kemenlu. 2019. Indonesia Dan Amerika Serikat Sambut Perayaan 70 Tahun Hubungan Bilateral.

JAKARTA.

- Kusnuardi. 2011. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Sub Daerah Aliran Sungai Gunting Kabupaten Jombang." 2:31–41.
- Lara. 2022. "Partisipasi Perempuan Di Lembaga Penanggulangan Bencana." 7877 (8.5.2017):2003–5.
- Listyowati, and Mia Siscawati. 2023. "Perempuan Dan Bencana: Kerentanan, Respon, Dan Inisiasi Perempuan Dalam Menghadapi Bencana." 6:158–72.
- Lubis, Dinar, Elisabeth Sidabutar, Loly Fitri, Nuraini Rahma, Hanifa Rini, Handa Tetrie, A. W. Darwis, Basitha Septia, Wibowo Fega, Ayu Pangestika, Meliana Nur, Anisa Olivia Ghina, Olia Wina, Natalia Niswa, Nabila Sri, Bintang Alam, Devita Marwana, Sari Niswa, Bintang Alam Saena, Sabrina Desain, and Tata Letak. 2023. "Pemimpin Perempuan Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana."
- Mehta, Manjari. 2007. "Lessons for Disaster Risk Reduction in South Asia."
- Nuriana, Dodi, Binahayati Rusyidi, and Muhammad Fedryansyah. 2020. "Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender." *Share: Social Work Journal* 9(2):179. doi: 10.24198/share.v9i2.25562.
- Pemerintah Kabupaten Jombang. 2018. "RPJMD 2018-2023 Jombang."
- peraturan daerah. 2011. "PERDA_1_2011 Pembentukan BPBD Jombang.Pdf."
- Permen P.A. 2021. "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(2):6.
- portal resmi pemerintah kabupaten jombang. 2021. "Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023." *Jombangkab.Go.Id*. Retrieved (<https://jombangkab.go.id/berita/bupati-membuka-musrenbang-penyusunan-perubahan-rpjmd-kabupaten-jombang-tahun-2018-2023>).
- Pradipta, V. N., and A. Afrimadona. 2020. "Implementasi Kerjasama Indonesia–Amerika Serikat Dalam Program Sustainable Ecosystems Advanced Periode 2016-2018." *Seminar Nasional Riset Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1(2):48–49.
- Radar Jombang. 2024. 8 Kecamatan Masuk Katageri Rawan Bencana. jombang.
- Stafford, Robert T. 2000. "Disaster Mitigation (Fema) Act of 2000." *Public Law* 1–26.
- Stephanus .M.E. 2021. "Partisipasi Negara Amerika Serikat Dalam Upaya Mitigasi Bencana Di Jombang."
- Sulistiyo, Mar'atus. 2015. "Peran Perempuan Terhadap Daya Pulih Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Dusun Pelangwot, Desa Pelangwot,." *Journal Geografi* 2(2):15–24.
- Suryana, Dadan. 2013. "RPB Madyopuro." *A Psicanalise Dos Contos de Fadas*. Tradução Arlene Caetano 466.
- U.S. Embassy Jakarta. n.d. Kemitraan USAID Dan Humanitarian Forum Indonesia Untuk Tingkatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penanggulangan Bencana. JAKARTA.
- UU no 24. 2007. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." *BPK RI* 21(5–6):1–49.